

BAB II

GAMBARAN UMUM NAGARI BALIMBING

2.1. Sejarah Singkat Nagari Balimbing

Sejarah terbentuknya Nagari Balimbing dijelaskan oleh Datuk Rusli (wawancara 13 Desember 2017) bahwa pada zaman dahulu ada sekelompok penduduk yang bermigrasi dari lereng Gunung Marapi. Mereka bermigrasi mengikuti arus sungai Batang Bangkaweh. Setelah menemukan tempat yang cocok di sekitaran tepi sungai yang sedikit landai dan subur barulah mereka memutuskan untuk menetap. Orang-orang ini kemudian menjadi nenek moyang masyarakat Nagari Balimbing.

Di sekitaran sungai sebelah timur pemukiman masyarakat banyak di tumbuhi oleh pohon kina, sedangkan di sebelah barat di tumbuhi pohon belimbing. Aliran sungai Batang Bangkaweh menjadi pemisah antara pepohonan kina dan belimbing. Setelah masyarakat yang bermukim di sekitar wilayah tersebut bertambah jumlahnya, maka mereka memutuskan untuk membuka lahan baru. Sebahagian membuka lahan di sekitar pohon kina yang kemudian menjadi *jorong* kinawai dan sebahagian lagi membuka lahan di sekitaran pohon belimbing yang sekarang menjadi wilayah *jorong* Balimbing. Beberapa abad kemudian dengan perkembangan penduduk yang sudah cukup banyak baru mereka melanjutkan membuka lahan di sawah kareh, bukit tamasu, dan padan pulai. Kawasan-kawasan inilah yang hingga saat ini menjadi daerah administratif Nagari Balimbing dengan pusat pemerintahan di *Jorong* Kinawai.

Saat UU No. 9 Tahun 1979 ditetapkan, masing-masing jorong di Nagari Balimbing bertransformasi menjadi desa administratif. Jorong-jorong tersebut memiliki pemerintahan sendiri dan mengelola pemerintahannya tanpa campur tangan dari Nagari Balimbing. Berdasarkan Perda No. 9 Tahun 2001, Nagari Balimbing telah mengikuti dan menjalankan instruksi dari perda tersebut. Hal itu dibuktikan dengan bersatunya lima jorong yang ada di Nagari Balimbing menjadi Nagari Balimbing. Selanjutnya pemilihan wali nagari pertama setelah berdirinya kembali nagari balimbing dilaksanakan pada tahun 2002. Kenapa saya katakan berdirinya kembali, karena sebelum reformasi masing-masing jorong di Nagari Balimbing merupakan desa administratif. Jorong-jorong tersebut menjalankan pemerintahan mereka sendiri dan memiliki perangkat desa sebagai penggerak roda pemerintahan. Namun, setelah reformasi dan berlakunya otonomi daerah di Indonesia maka ke lima jorong yang ada di Nagari Balimbing bergabung kembali menjadi Nagari Balimbing dan menyerahkan wewenang penyelenggaraan pemerintahan kepada pemerintah Nagari Balimbing (wawancara dengan Bapak Yasripen, 4 Juli 2017).

2.2. Kondisi Fisik dan Sumber Daya *Nagari* Balimbing

2.2.1. Keadaan Geografis *Nagari* Balimbing

Nagari Balimbing terdapat di Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar yang berbatasan dengan *Nagari* Rambatan di sebelah utara, *Nagari* Tigo Koto di sebelah Barat, *Nagari* Simawang dan Kabupaten Solok di sebelah selatan dan Kecamatan Tanjung Emas di sebelah timur (profil *Nagari* Balimbing). *Nagari* Balimbing terletak di dataran tinggi sehingga suhu daerah ini relatif rendah, dimana ketinggiannya berada di

578 mdpl (Badan Pusat Statistik Tanah Datar, 2017). *Nagari* Balimbing memiliki bentang alam yang unik yaitu dikelilingi oleh perbukitan. Jarak antara *Nagari* Balimbing dengan pusat kecamatan adalah 7 km sedangkan ke pusat kabupaten 19 km.

Luas *Nagari* Balimbing berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Datar tahun 2017 meliputi 29,44 km² dengan rincian sebagai berikut:

1. *Jorong* Balimbing 6,27km²
2. *Jorong* Kinawai 7,47km²
3. *Jorong* Sawah Kareh 5,78km²
4. *Jorong* Padang Pulai 5,37km²
5. *Jorong* Bukit Tamasu 4,61km²

Dari data diatas dapat dilihat bahwa *Jorong* Kinawai merupakan wilayah *jorong* terluas di *Nagari* Balimbing. Pusat Pemerintahan *Nagari* Balimbing juga terletak di *Jorong* Kinawai.

2.2.2. Demografi *Nagari* Balimbing

2.2.2.1. Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk *Nagari* Balimbing

Secara teoritis disebutkan bahwa jumlah penduduk yang besar merupakan salah satu modal dasar pembangunan. Hal ini dimaksudkan apabila jumlah penduduk yang besar tersebut dapat diberdayakan sesuai kodrat, keahlian, dan bidang kerjanya masing-masing. Sebaliknya, apabila jumlah penduduk yang besar tidak dapat diberdayakan dan dikendalikan dengan bijak dan terencana maka akan menjadi beban pembangunan.

Berdasarkan data terakhir yang diambil dari Kecamatan Rambatan Dalam Angka. Ini merupakan data hasil pendataan penduduk oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Datar. Jumlah penduduk *Nagari* Balimbing sebanyak 7.755 jiwa. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.

Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk *Nagari* Balimbing Tahun 2017

No.	<i>Jorong</i>	Penduduk (dalam Jiwa)	Kepadatan Penduduk
1.	Balimbing	2.348	378
2.	Kinawai	796	172
3.	Sawah Kareh	3.107	416
4.	Padang Pulai	256	48
5.	Bukit Tamasu	1.248	216
	Jumlah	7.755	263

Sumber data: Kecamatan Rambatan Dalam Angka 2017 (Data BPS Kabupaten Tanah Datar, diakses pada 13 Desember 2017)

2.2.2.2. Sex Ratio *Nagari* Balimbing

Berdasarkan data terakhir yang diambil dari Kecamatan Rambatan Dalam Angka. Ini merupakan data hasil pendataan penduduk oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Datar. Jumlah penduduk *Nagari* Balimbing sebanyak 7.755 jiwa. Berikut data sex ratio di *Nagari* Balimbing pada tahun 2015 dan 2016:

Tabel 2.2.

Sex Ratio Nagari Balimbing Pada Tahun 2015 dan 2016

	2015		Sex ratio	2016		Sex ratio
	Laki-laki	Perempuan	94,43	Laki-laki	Perempuan	94,50
	3.765	3.987		3.767	3.988	
Jumlah	7.742			7.755		

Sumber data: Kecamatan Rambatan Dalam Angka 2017(Data BPS Kabupaten Tanah Datar, diakses pada 13 Desember 2017)

2.2.3. Perekonomian Nagari Balimbing

Percepatan pemulihan ekonomi merupakan salah satu prioritas rencana strategis pembangunan Nagari Balimbing. Seperti halnya kondisi perekonomian di Kabupaten Tanah Datar, perekonomian Nagari Balimbing Juga menunjukkan pertumbuhan positif, walaupun hasilnya masih jauh dari harapan dalam arti perbaikan (*recovery*) ekonomi yang sesungguhnya. Pemerintah Nagari Balimbing senantiasa tetap berusaha untuk mengarahkan kebijakan pembangunan ekonomi melalui ekonomi rumah tangga dan mewujudkan landasan pembangunan yang lebih kukuh bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan. Kondisi tersebut akan dicapai melalui pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi yang ada, terutama usaha kecil, menengah dan koperasi.

Perekonomian masyarakat Nagari Balimbing yang utama adalah pertanian. Sebahagian besar wilayah Nagari Balimbing merupakan lahan subur untuk pertanian seperti padi, jagung, cengkeh, cabai, dan lain-lain. Menurut keterangan Sekretaris Nagari Balimbing Bapak Yasripen (wawancara 4 Juli 2017), di Nagari Balimbing saat ini

menjadi pusat budidaya kakao dan jagung. Serta *Nagari* Balimbing juga mengandalkan kelompok-kelompok tani dan peternakan.

2.2.4. Pendidikan

Peningkatan mutu pendidikan di *Nagari* Balimbing merupakan salah satu prioritas utama dalam pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) sebab orang yang memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi cenderung memiliki ekonomi yang baik. Dengan demikian apabila ekonomi masyarakat sudah baik tentu akan terwujud kesejahteraan masyarakat.

Untuk meningkatkan pendidikan masyarakat di *Nagari* Balimbing tersedia fasilitas belajar sebagai berikut:

Tabel 2.3.

Daftar Nama Sekolah Negeri dan Swasta di Nagari Balimbing tahun 2016

No.	Sekolah Dasar	SLTP	SLTA
1.	SDN 04 Kinawai	SMPN 3 Rambatan	MAS Balimbing
2.	SDN 08 Sawah Kareh	MTSs Plus Balimbing	
3.	SDN 11 Balimbing		
4.	SDN 15 Kinawai		
6.	SDN 16 Balimbing		
7.	SDN 24 Bukik Tamasu		
8.	SDN 26 Kinawai		
9	SDN 35 Padang Pulai		

Jumlah	9	2	1
Total	12		

Sumber data: Kecamatan Rambatan Dalam Angka 2017(Data BPS Kabupaten Tanah Datar, diakses pada 13 Desember 2017)

2.2.5. Kesehatan

Pembangunan dalam bidang kesehatan atau peningkatan kualitas kesehatan masyarakat merupakan salah satu bagian terpenting dalam pembangunan sumber daya manusia, seperti yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Untuk mewujudkan misi tersebut diperlukan keterlibatan seluruh pihak terkait dalam hal aparatur pemerintahan dari pusat sampai *Nagari* dan terutama sekali dukungan berupa peran serta aktif dari masyarakat. Salah satu program ini adalah ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang baik akan membawa pengaruh positif bagi kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Beranjak dari hal diatas berbagai sarana dan prasarana kesehatan yang tersedia di *Nagari* Balimbing dapat kita lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.4.
Sarana dan Prasarana Kesehatan di Nagari Balimbing

NO.	JORONG	SARANA / PRASARANA				
		PUSKES MAS PEMBA NTU	POLIN DES	POSYA NDU	PRAK TEK DOKT ER	PRAK TEK BIDAN
1	Balimbing	√	√	√	-	√
2	Kinawai	√	-	√	-	√
3	Padang Pulai	-	√	√	-	√
4	Sawah Kareh	√		√	-	√
5	Bukittamasu	-	-	√	-	-

Sumber: Data Profil Nagari Balimbing, 2016

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa sarana kesehatan yang ada di *Nagari* Balimbing dikatakan belum mencukupi kebutuhan dalam jumlah, terlebih lagi sarana yang ada belum dilengkapi jumlah tenaga kesehatan yang cukup dan fasilitas / peralatan yang memadai.

2.3. Tata Pemerintahan *Nagari* Balimbing Berdasarkan Perspektif Desa Adat

2.3.1 Pemerintah *Nagari*

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 hanya mengatur hal yang pokok-pokok dalam penyelenggaraan Pemerintahan *Nagari*, sedangkan secara detail dan teknisnya diatur oleh Pemerintah Kabupaten dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar sesuai dengan kewenangan otonomi yang dimiliki dan keanekaragaman serta spesifik *Nagari* yang bersangkutan.

Yang dimaksud pemerintahan *Nagari* dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 adalah kegiatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah yang dilaksanakan oleh organisasi pemerintah terendah tetapi tidak lagi berada dibawah Camat karena *Nagari* merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Oleh karena itu, Pemerintah *Nagari* berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga *Nagari* berdasarkan otonomi asli yang dimilikinya.

Dalam hal ini, pemerintah *Nagari* dapat mengembangkan peran serta seluruh masyarakat secara demokratis dengan memanfaatkan nilai-nilai budaya Minangkabau serta peranan lembaga Adat *Nagari* / *Kerapatan Adat Nagari* dan Lembaga Unsur lainnya sebagai mitra dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Selain Pemerintah *Nagari*, dalam sistem Pemerintahan *Nagari* juga terdapat Badan Perwakilan Rakyat *Nagari* (BPRN). BPRN adalah lembaga legislatif di *Nagari* yang bekerjasama dengan Pemerintah *Nagari* dalam melaksanakan Pemerintahan *Nagari* Balimbing. BPRN yang merupakan komponen Pemerintahan *Nagari*, senantiasa mengupayakan terciptanya suasana yang kondusif guna mendukung terlaksananya Pembangunan dan Pengembangan *Nagari* dengan baik, serta merangsang tumbuh dan berkembangnya kreasi peran serta masyarakat yang sehat dan dinamis dalam pembangunan *Nagari*.

BPRN telah menunjukkan kinerja yang baik disamping mampu menjembatani pihak eksekutif, masyarakat dan memberikan pengertian serta penjelasan program *Nagari*.

Komposisi Keanggotaan BPRN yaitu terdiri dari perwakilan lembaga unsur yang ada di dalam masyarakat. Lembaga unsur tersebut yakni *unsur pemuda, unsur cadiak pandai, unsur bundo kanduang, unsur ulama, unsur niniak mamak (penghulu)*.

Jumlah keanggotaan BPRN *Nagari* Balimbing yakni 11 orang, adapun kelengkapannya yakni :

- a. Ketua 1 orang
- b. Wakil Ketua 1 orang
- c. Sekretaris 1 orang
- d. Komisi A Bidang Pemerintahan 2 orang
- e. Komisi B Bidang Pembangunan 3 orang
- f. Komisi C Bidang Kemasyarakatan 3 orang

2.3.2. Karapatan Adat *Nagari* (KAN)

KAN merupakan lembaga adat yang bersama dengan Pemerintahan *Nagari* mempunyai peranan penting dalam pembangunan *Nagari*. *Kerapatan Adat Nagari* merupakan lembaga *Kerapatan* niniak mamak pemangku adat yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat yang berlaku di *Nagari* Balimbing dan merupakan lembaga tertinggi dalam penyelenggaraan adat di *Nagari*. Adapun keanggotaan KAN terdiri dari :

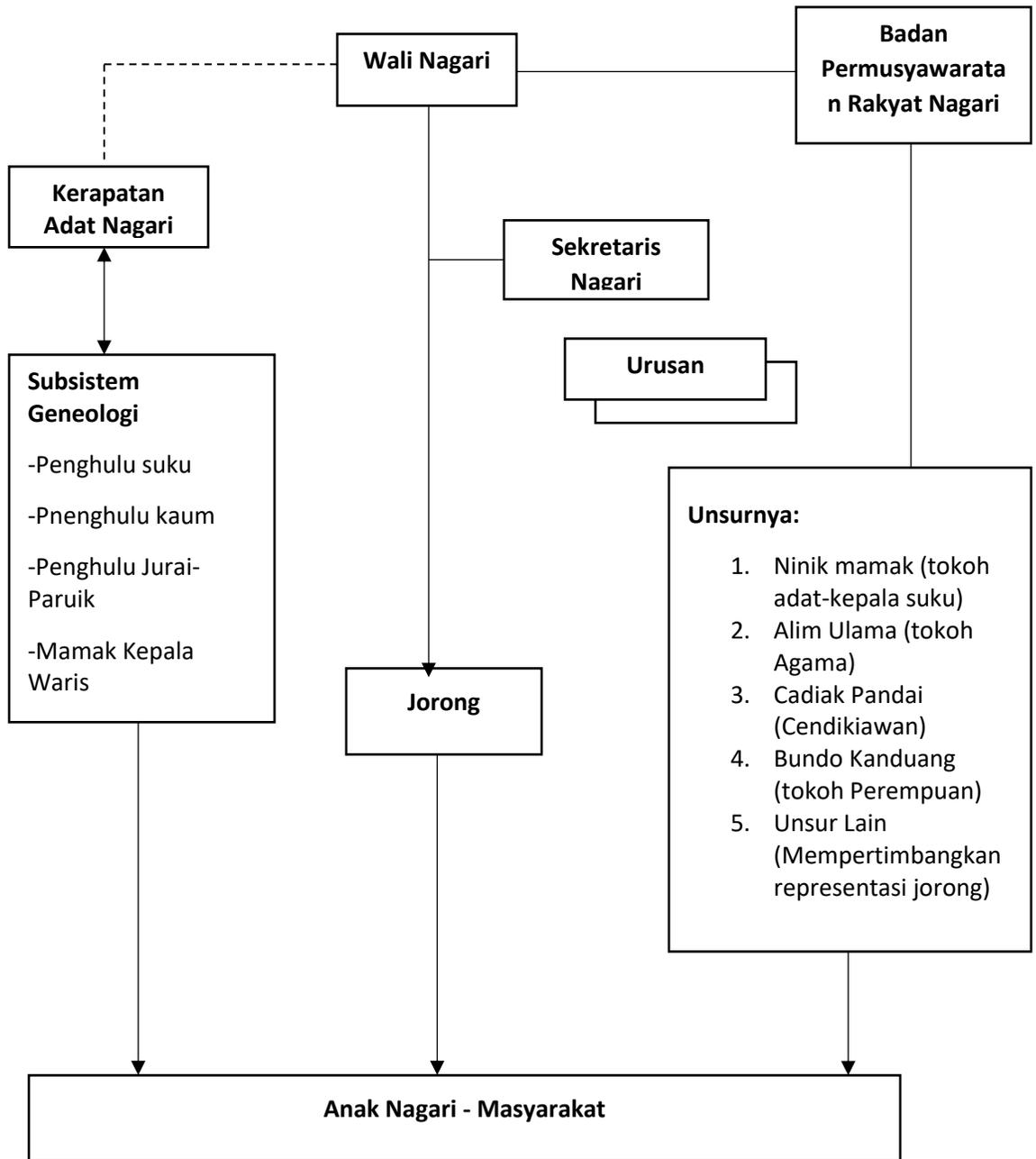
- a. Ketua 1 orang
- b. Wakil Ketua 1 orang
- c. Sekretaris 1 orang
- d. Wakil Sekretaris 1 Orang
- e. Bendahara 1 orang
- f. Bidang Kekayaan *Nagari* 4 orang
- g. Bidang Penyelesaian Sangketo Sako dan Pusako 4 orang
- h. Bidang Pengembangan Adat dan Syara' 4 orang

Keanggotaan KAN diperoleh dari perwakilan *panghulu* (datuak) dari masing-masing rumah gadang *saparuik* (suku matrilineal yang memiliki kekerabatan terdekat). Sehingga KAN dapat menjalankan proses adat di *Nagari* Balimbing dengan cara musyawarah antar anggotanya.

Di *Nagari* Balimbing terdapat empat suku *saparuik*, yang merupakan salah satu syarat untuk berdirinya sebuah *Nagari*. Masing-masing suku *saparuik* memiliki rumah gadang (rumah adat) sendiri dan memiliki perangkat adat sendiri. Perangkat adat berupa *panghulu* sebagai ketua suku, *malin* sebagai pemangku agama, dan *cadiak pandai* sebagai cendekiawan. Berikut suku *saparuik* yang ada di *Nagari* Balimbing:

- Koto Piliang
- Bodi Caniago
- Bendang / Kampai
- Simabua / Payobada

Gambar 2.1.
Bagan Struktur Pemerintahan Nagari Balimbing



Sumber: Olahan Penulis berdasarkan struktur Pemerintahan Nagari menurut Yasril Yunus dalam Model Pemerintahan Nagari Yang Partisipatif dalam Masyarakat Minangkabau, 2007

Berikut penjelasan mengenai bagan struktur Pemerintahan Nagari Balimbing diatas:

1. Wali Nagari bersama dengan BPRN adalah pemerintahan yang utama dalam nagari.
2. Wali Nagari diangkat melalui pemilihan langsung dan bertanggungjawab kepada BPRN Balimbing.
3. KAN adalah pendukung Pemerintahan Nagari dari segi adat dan penyelesaian konflik secara adat tentang sako dan pusako serta pertanahan.
4. KAN secara kolektif berfungsi sebagai perancang aturan nagari yang akan ditetapkan oleh BPRN atas usulan Wali nagari.
5. Wali Nagari adalah pemimpin nagari yang melaksanakan tugastugas nagari dan tugas pemerintahan yang lebih tinggi atas dasar dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
6. KAN adalah pimpinan kolektif tertinggi institusi adat nagari dalam memimpin anak-kemenakan secara geneologis.
7. Unsur KAN adalah komponen masyarakat yang tergabung dalam BPRN nagari, atas nama warga nagari.